

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orientasi ideologi menyangkut identitas kolektif, platform, dan rumusan program partai politik, sedangkan orientasi pragmatis terkait erat dengan kecenderungan sikap dan perilaku politik aktual dan konkret yang ditunjukkan oleh elit dan atau aktivis partai politik yang cenderung tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan orientasi ideologinya. Menurut Cornelis Lay,¹ di dalam partai politik terdapat tiga orientasi utama, yaitu: pertama, partai politik sebagai mesin politik pengumpul suara (*electoral machine*), dimana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (*voter seeker*); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking atau office seeking*) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai politik sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologis yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (*policy seeking*).

Ketiga orientasi kepartaian di atas, partai politik di Indonesia pada umumnya cenderung tidak memiliki orientasi yang jelas terhadap landasan pencapaian cita-cita ideologi. Namun lebih pada sarana untuk pengumpul suara (*electoral machine*), atau sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking atau office seeking*). Kecenderungan itu terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini: (a) partai-partai politik cenderung bekerja secara pragmatis, (b) terjadinya oligarki partai politik, (c) partai politik berorientasi pada kekuasaan, bukan dibangun dari kedekatan ideologi, (d) partai politik belum secara maksimal dalam membumikan ideologi kedalam kebijakan publik. Orientasi partai politik juga dapat dilihat dari bagaimana partai politik mencari mitra

¹Deliar Noer, Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Partai Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden, ALVABET, Jakarta, 1999, hlm. 303.

koalisi. Landasan koalisi bisa berupa faktor teknis, karena tidak mampu memenuhi syarat untuk dapat mengajukan kandidat dari internal partai. UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa partai politik yang hendak mengajukan calon memiliki minimal 25% dari jumlah suara atau 20% perolehan kursi sehingga syarat ini membuat banyak partai melakukan koalisi.²

Hakikat sebuah koalisi adalah membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*), dan tahan lama (*durable*).³ Situasi politik multipartai, koalisi merupakan keharusan karena: a) Tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, b) Koalisi partai politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, c) Pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi sehingga koalisi partai politik tidak bisa dihindarkan.⁴

Idealnya pembentukan koalisi berdasarkan atas kesamaan ideologi atau *platform* yang di miliki oleh partai politik. Karena ideologi menjadi pedoman dan tujuan bagi partai politik dalam pembuatan keputusan-keputusan politik. Namun pembentukan koalisi yang sering ditemui adalah koalisi yang membingungkan, secara kompleks kekuatan politik, aktor, dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Lili Romli bahwa partai-partai politik dalam pilkada langsung tersebut cenderung pragmatis. Koalisi yang mereka bangun cenderung bukan berlandaskan kesamaan visi-misi, *platform*, dan program-program partai, namun berdasarkan kepentingan jangka pendek yakni merebut kekuasaan.⁵ Pembentukan koalisi oleh partai politik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal umumnya dibangun untuk sekedar memenuhi prasyarat administratif pencalonan.

² UU. No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

³ Masdiyan Putri, Zuly Qodir, Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Jurnal Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2015, hlm. 96.

⁴ Deliar Noer., loc.cit.

⁵ Romli, Lili, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 356

Pembahasan pembentukan koalisi di tingkat lokal juga penting untuk memahami tentang orientasi partai politik dalam pembentukan pemerintahan.

Partai politik jika dilihat dari fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas memperlihatkan perilaku yang cenderung tidak konsisten terhadap ideologi dan cenderung pragmatis. Dengan perilaku partai politik yang cenderung pragmatis dan meninggalkan nilai-nilai ideologi akan berdampak pada pendidikan politik masyarakat. Masyarakat tidak dibiasakan untuk memiliki idealitas, karena berorientasi keuntungan jangka pendek. Sebagaimana maraknya praktik *money-politic* dalam pemilu merupakan contoh pragmatisme yang terjadi dimasyarakat.

Secara teoritis koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Lay misalnya menyatakan bahwa pilkada langsung dan pembentukan koalisi lintas partai di Indonesia seringkali tidak mengikuti pola baku pengelompokan ideologis.⁶ Pratikno juga menyatakan bahwa pilkada langsung membuat partai politik seringkali mengenyampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis seperti uang dan kekuasaan sebagai dasar pembentukan koalisi.⁷

Menurut Arend Lijphart, teori tentang koalisi dapat dibedakan menjadi: pertama adalah *minimal winning coalitions* yang menganut prinsip besaran (*zise principle*), koalisi ini terdiri atas dua atau lebih partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen, tetapi kemenangan ini bersifat minimal. Kedua, yaitu *minimum size coalitions* yaitu koalisi yang didasarkan pada asumsi yang sama tentang maksimalisasi kekuatan, koalisi ini lebih rasional dan logis dalam memperhitungkan kekuatan daripada yang pertama karena koalisi yang dibentuk berdasarkan kekuatan strategis masing-masing partai di parlemen. Ketiga, *coalitions with smallest number of parties* yakni koalisi yang dibentuk

⁶ Ibid., hlm. 237

⁷ Pratikno, *Political Parties in Pilkada: Some Problem for Democratic Consolidation*, ISEAS, Singapore, 2009, hlm 56.

antara partai besar dan partai kecil dengan alasan bahwa berkoalisi dengan partai kecil mempermudah di dalam bernegosiasi dan tawar menawar. Keempat, *minimal range coalitions* yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kesamaan pandangan dan preferensi didalam kebijakan. Kelima, *minimal connected winning coalitions*, yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kedekatan hubungan kebijakan atau suatu isu tertentu⁸.

Terfragmentasinya kekuatan partai setelah Pemilihan Legislatif tahun 2014 mengakibatkan koalisi antar partai politik menjadi suatu keharusan pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015. Begitu juga dengan pemetaan perolehan kursi oleh partai di parlemen dimana tidak ada suara mayoritas yang diperoleh oleh salah satu partai politik.

Tabel 1.1: Daftar Perolehan Kursi Parpol Pemilihan Legislatif 2014 Kota Bukittinggi

No	Partai politik	Jumlah perolehan kursi
1.	Partai NasDem	1 kursi
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 kursi
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3 kursi
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1 kursi
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4 kursi
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4 kursi
7.	Partai Demokrat	4 kursi
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3 kursi
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3 kursi
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1 kursi
Total		25 kursi












Sumber: KPU Kota Bukittinggi 2015

Persoalan mengenai pembentukan koalisi yang sering kali tidak berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai politik, pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 pembentukan koalisi partai politik yang terbentuk cenderung berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai. Sesuai dengan konsep Arend Lijphart tentang koalisi yaitu *Minimum*

⁸ Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial, Raja Grafindo, Jakarta 1995, hlm 221.

Conected Winning bahwa pembentukan koalisi partai berdasarkan kesamaan ideologi atau platform partai.

Tabel 1.2: Data Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota beserta Partai 34 Pendukung Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015

No Urut	Pasangan calon	Partai Pendukung
1.	Taslim Chaniago Marfendi	 Partai Amanat Nasional (PAN)  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	Febby Zul Ifkar Rahim	 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
3.	Harma Zaldi Rahmi Brisma	 Partai Golongan Karya (Partai Golkar)  Partai Nasional Demokrat (NasDem)
4.	Ramlan Nurmatias Irwandi	 Independen  Partai Demokrat  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.	Ismet Amzis Zulbahri Majid	 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Sumber:
KPU Kota
Bukittinggi
2015
Da
ri tabel

diatas terdapat 4 bagian koalisi partai politik yang terbentuk pada Pilkada Bukittinggi 2015 Koalisi pertama adalah koalisi PAN dan PKS yang memiliki ideologi kesamaan yaitu ideologi Islam sebagai ideologi kedua partai tersebut. Koalisi kedua adalah PPP, PKB, dan Partai Hanura dimana koalisi ini terdapat dua partai (PPP dan PKB) dengan ideologi partai yang sama yaitu ideologi Islam serta satu ideologi nasionalis (Hanura). Koalisi ini cenderung pragmatis karena pembentukan koalisi ini didasarkan oleh perolehan kursi di parlemen yang tidak mencukupi syarat pencalonan oleh partai.

Koalisi ketiga adalah Partai Golkar dan Partai NasDem. Koalisi ini juga berbentuk kesamaan ideologi partai dimana Partai Golkar dan Partai Nasdem berideologikan partai nasionalis. Koalisi keempat Partai Demokrat, Partai PDIP, dan Partai GERINDRA. Koalisi Ini juga berdasarkan kesamaan ideologi masing-masing partai memiliki ideologi nasionalis.

Dari keempat bagian koalisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koalisi partai yang terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 umumnya berdasarkan pertimbangan kesamaan ideologi atau platform partai politik. Fenomena tersebut membuktikan bahwa pola koalisi partai yang terbentuk tidak selalu cenderung pragmatis seperti pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 yang cenderung ideologis. Bentuk koalisi tersebut juga dapat membuktikan bahwa setidaknya pelembagaan partai di tingkat lokal khususnya di Kota Bukittinggi cukup berjalan baik.

Menjelang pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020, Kepiawaian mengelola situasi dan dinamika politik lokal menjadi sangat penting untuk menentukan sukses tidaknya partai politik dalam mendapatkan dukungan internal ataupun kemudahan membangun koalisi dalam mengusung pasangan calon dan merebut kemenangan. Koalisi yang akan dibentuk disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Partai GERINDRA dan PKS tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan untuk dapat memenangkan pilkada jika tidak melakukan koalisi dengan partai lainnya sehingga kedua partai membutuhkan dukungan partai lainnya agar dapat memenangkan pemilihan, (2) kekuatan petahana yang kuat. Ini berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana pembentukan koalisi yang dilakukan oleh partai politik berpengaruh besar terhadap proses pilkada kota bukittinggi mendatang. Koalisi yang akan dibentuk oleh partai politik juga memberikan gambaran kekuatan politik yang terbentuk. Maka dari itu, terkait pembentukan koalisi peneliti mencoba melihat orientasi yang terdapat pada partai politik sehingga penelitian ini akan membahas mengenai **Orientasi Partai GERINDRA dan PKS dalam Pembentukan Koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Jika ditinjau kepada hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 untuk DPRD Kota Bukittinggi terdapat dua partai politik sebagai partai pemenang dengan kekuatan berimbang

di parlemen. Berikut hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi seluruh partai politik pada Pemilu Legislatif Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Tabel 1.3: Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi 16 Partai pada Pemilu Legislatif 2019 Kota Bukittinggi

No	Partai politik	Jumlah perolehan suara	Jumlah perolehan kursi	Persentase
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.164 Suara	1 kursi	3,6%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	10.365 Suara	5 kursi	17,2%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1.671 Suara	-	2,8%
4.	Partai Golongan Karya (GolKar)	5.472 Suara	3 kursi	9,1%
5.	Partai NasDem	3.962 Suara	2 kursi	6,7%
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	298 Suara	-	0,5%
7.	Partai Berkarya	1.222 Suara	-	2%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.993 Suara	5 kursi	14,9%
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	175 Suara	-	0,3%
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.620 Suara	2 kursi	7,7%
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	138 Suara	-	0,2%
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.032 Suara	3 kursi	13%
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.542 Suara	-	2,5%
14.	Partai Demokrat	10.227 Suara	4 kursi	17%
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.652 Suara	-	2,7%
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (No. Urut 20)	0 Suara	-	0%
Total		60.263 Suara	25 kursi	100%

Sumber: KPU Kota Bukittinggi 2019

Dari tabel diatas, partai GERINDRA dan PKS keluar sebagai partai pemenang pada Pemilu 2019 Kota Bukittinggi. Kedua partai tersebut juga memiliki perolehan kursi yang

berimbang sehingga partai GERINDRA dan PKS sama-sama berpeluang untuk meraih kursi eksekutif dalam Pilkada Kota Bukittinggi mendatang. Untuk dapat memenangkan Pilkada, kedua partai tersebut harus matang dalam mengelola eskalase politik salah satunya adalah terhadap pembentukan koalisi oleh kedua partai politik. Pembentukan koalisi oleh partai politik dianggap penting melihat bahwa kondisi perpolitikan yang berkembang di Kota Bukittinggi tidak hanya didominasi oleh partai politik, namun kekuatan politik *Independen* menjadi tantangan terbesar oleh partai mengingat kepala daerah Kota Bukittinggi berstatus *Independen*. Selain itu, sebaran suara yang terfragmentasi kedalam banyak simpul partai mengakibatkan pembentukan koalisi menjadi suatu keharusan agar dapat memenangkan pilkada.

Seperti yang diungkapkan para ahli bahwa partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik lainnya. Giovanni Sartori menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai- dan cita-cita yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁹

Sebagai suatu kelompok politik, partai GERINDRA dan PKS menarik untuk dijadikan sebagai objek pada penelitian ini. Penelitian ini membandingkan kegiatan politik dalam berbagai kategori atau bagian. Melalui studi perbandingan politik penelitian ini akan mengungkapkan dari kedua objek penelitian apakah pembentukan koalisi yang dilakukan masih memegang kepercayaan ideologi atau mengabaikannya. Dengan demikian penelitian

⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 160-161.

ini dapat mendeskripsikan perbedaan dan persamaan orientasi yang terdapat pada kedua partai tersebut.

Persamaan yang terdapat pada partai Gerindra dan PKS adalah kedua partai merupakan partai pemenang pada pemilu legislatif 2019 yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dengan jumlah berimbang. Dengan perolehan kursi yang signifikan maka kedepan dimungkinkan arah perpolitikan di Kota Bukittinggi yang dihasilkan akan didominasi oleh ideologi dari kedua partai tersebut. Sedangkan untuk perbedaannya adalah partai Gerindra dan PKS merupakan partai yang berbeda ideologi. Dimana partai Gerindra berideologikan Nasionalis dan PKS berideologikan Islam.

Peneliti berpandangan bahwa melalui studi perbandingan politik akan mendapatkan jawaban bagaimana orientasi partai politik dalam membentuk koalisi pada pilkada Kota Bukittinggi. Maka peneliti memutuskan melakukan penelitian perbandingan orientasi partai Gerindra dan PKS agar dapat melihat arah dari orientasi kedua partai tersebut pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

Orientasi kedua partai politik dalam pembentukan koalisi menarik untuk diteliti mengingat bahwa kedua partai merupakan partai yang berbeda ideologi. Kecenderungan sikap politik yang dilahirkan oleh kedua partai politik akan dipengaruhi oleh ideologi partai. Sebab ideologi merupakan landasan awal kerangka berfikir partai politik dalam melahirkan sikap politik. Salah satunya adalah bagaimana partai politik mencari rekan dalam pembentukan koalisi.

Berangkat dari pemetaan koalisi partai politik Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 koalisi yang dibentuk oleh partai politik cenderung bercorak ideologis. Selain itu, koalisi yang dibentuk oleh partai politik pada pilkada Bukittinggi 2015 tidak terpengaruh dari koalisi yang telah terbentuk pada pemilihan tingkat nasional. Jika pada tahun 2014 bentuk koalisi

pada tingkat nasional adalah koalisi lintas ideologi, pada pilkada Bukittinggi 2015 koalisi yang terbentuk cenderung ideologis.

Penulis berpandangan bahwa koalisi yang telah terbentuk pada tingkat nasional menjadi alternatif utama bagi partai politik ditingkat lokal untuk membentuk koalisi dengan partai lainnya. Karena ada rentetan waktu yang berhimpitan antara Pilkada 2020 dengan tahapan Pemilu serentak 2019 yang secara emosional memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Setidaknya kecenderungan partai politik dalam membentuk koalisi merujuk kepada koalisi yang sebelumnya telah pernah terbentuk. Selain itu, dua tipe koalisi yang dibangun tingkat lokal selain tidak mengikuti pola koalisi politik nasional, koalisi ditingkat lokal cenderung mengabaikan *platform* dan ideologi partai politik. Atas dasar itu, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana perbandingan orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perbandingan orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena partai politik terkait orientasi partai politik GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020 dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan Jurusan Ilmu Politik dalam hal studi orientasi partai politik dalam membentuk koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk memperbaiki pelebagaan masing-masing partai politik di tingkat lokal dimana penelitian ini berfokus kepada orientasi partai politik bagaimana koalisi dari partai politik sangat berpengaruh menjadi dukungan kuat bagi calon kepala daerah yang diusung koalisi tersebut



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Secara umum tinjauan pustaka merupakan kerangka konseptual dalam penulisan. Tinjauan pustaka merupakan dasar berpijak dari sisi kajian teori. Tinjauan pustaka ini dibuat cukup lengkap agar dapat di pahami seluruh bagian penulisan secara konsep dan teoritis. Dapat dikatan tinjauan pustaka ini merupakan sebuah peninjauan kembali atas penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna memperkuat dan membuktikan penelitian.

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada yang menjadi pilihan peneliti yang dianggap cukup relevan untuk diajukan sebagai bahan referensi terhadap penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan partai politik dalam pembentukan koalisi. Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Dadang W.A mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018 dengan judul *“Perbandingan Koalisi Partai politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo”*.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan koalisi partai politik pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai model koalisi pada era pemerintahan kedua presiden tersebut. Penelitian ini menemukan persamaan dan perbedaan terhadap model koalisi pada kedua pemerintahan tersebut.

Penelitian selanjutnya dalam bentuk jurnal yang termuat didalam Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya oleh Mahesa Rannie dan Zulhidayat dengan judul *“Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presedensial Indonesia Pasca Amandemen UUD*

¹⁰ Dadang WA, Perbandingan Koalisi Partai politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo, Skripsi, Yogyakarta, 2018.

1945”¹¹. Jurnal ini membahas tentang pola koalisi yang terjadi di tiga periode pemerintahan Indonesia pasca amandemen ketiga UUD 1945. Dalam jurnal ini dibahas bahwa pola koalisi pada tiga periode pemerintahan yang terjadi sedikit berbeda. Namun terdapat kesamaan bahwa pola koalisi dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial cenderung mudah rapuh dan terpecah belah serta memerlukan kompromi antara berbagai pihak antara lain eksekutif, legislatif, dan partai politik. Koalisi yang cenderung lemah diakibatkan oleh visi dan misi partai politik belum bersinergi demi kepentingan bangsa, terlebih lagi gesekan antar partai yang terjadi yang disebabkan perbedaan ideologi.

Jurnal berikutnya diteliti oleh Moch. Nurhasim Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berjudul “Koalisi “NANO-NANO” Pilkada Serentak 2018”.¹² Jurnal ini mengungkap bagaimana pola koalisi pada pilkada serentak 2018. Dimana pola koalisi yang terbentuk tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Terdapat gejala koalisi nano-nano yang berulang bersifat variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Pola Koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

Kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan *office-seeking* dan pendekatan *policy-seeking*. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indonesia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan *cartel-seeking*.

¹¹ Mahesa Rannie, Zulhidayat, “Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Simbur Cahaya, 2017, Volume XXIV No. 3

¹² Moch Nurhasim, Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018, Jurnal Penelitian Politik LIPI, 2018, Vol. 15, No.2

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lutfi Makhasim dengan judul "*Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik: Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015*".¹³ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pembentukan koalisi lintas partai politik menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung serentak di Jawa Tengah. Penelitian ini menghasilkan tawaran baru terhadap pembentukan koalisi dan orientasi partai politik di Indonesia yaitu terdapat empat tipologi koalisi yaitu Koalisi Kecil Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Dari keempat tipologi pembentukan koalisi tersebut Koalisi Besar Pragmatis (KBP) menjadi pilihan yang paling umum dan ditempuh oleh partai politik, sedangkan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP) adalah yang paling jarang dipilih oleh Partai politik untuk membentuk koalisi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Esty Ekawati dengan judul "*Koalisi Partai Islam Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014*".¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pemilihan yang digunakan memiliki pengaruh terhadap model pembentukan koalisi. Penelitian ini membandingkan sistem pemilihan pada tahun 1999 dengan pemilihan tahun 2014. Pada pemilu tahun 1999 sistem pemilihan yang dilakukan adalah dipilih melalui sidang MPR menghasilkan koalisi partai yang didasari oleh sesama ideologi dan tujuan partai yang berkoalisi. Namun pada pemilihan tahun 2004, 2009, dan tahun 2014 pembentukan koalisi partai yang tidak berdasarkan dengan pertimbangan platform partai. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 dipilih secara langsung oleh rakyat.

¹³ Lutfi Makhasin, *Orientasi Ideologi Dan Pragmatisme Politik: Model Pembentukan Koalisi Dalam Polkada Serentak Di Jawa Tengah 2015*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. JSP. 2016. Vol. 19, No. 3.

¹⁴ Esty Ekawati, *Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*, Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang partai politik dalam pembentukan koalisi lebih mengarah kepada bagaimana koalisi yang telah terbentuk direalisasikan, bagaimana strategi yang dilakukan oleh koalisi dalam memenangkan pilkada, serta bagaimana karakteristik koalisi yang terbentuk. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan permasalahan tentang orientasi yang dimiliki oleh partai politik. Sehingga penelitian ini mengarah kepada kemungkinan koalisi yang akan terbentuk oleh partai politik dilihat dari orientasi yang dimiliki oleh partai politik. Orientasi partai politik menjadi landasan awal dalam melahirkan sikap politik salah satunya dalam hal pembentukan koalisi.

Penelitian sebelumnya secara konseptual dan teoritis terdapat beberapa kesamaan yang digunakan oleh peneliti yakni mengurai pola keterbentukan koalisi partai dan identifikasi kecenderungan partai politik dalam membentuk koalisi. Peneliti merujuk kepada fenomena pemilihan kepala daerah yang mengisyaratkan pembentukan koalisi oleh partai politik. Kesamaan lain terdapat pada penggunaan teori. Sehingga peneliti tetap menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi peneliti dalam menangkap fenomena baru ini.

Tabel 2.1: Perbandingan penelitain terdahulu

Penulis dan Judul penelitian	Temuan Penting	Kelebihan	Kelemahan
Skripsi: Dadang W.A Perbandingan Koalisi Partai politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo	Koalisi yang terbentuk melahirkan persamaan dan perbedaan di antara kedua model koalisi pemerintahan.	Penelitian ini menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan yang sekaligus menjadi kelemahan dari kedua model koalisi pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan era Joko Widodo	Penelitian ini hanya berfokus kepada koalisi yang sudah terbentuk pada kedua era pemerintahan tersebut. Peneliti tidak memasuki ruang penelitiannya kepada internal partai dalam membentuk koalisi. Sehingga peneliti hanya berpatokan kepada koalisi

gemuk yang telah terbentuk tanpa mengulas mengenai alasan kenapa koalisi gemuk tersebut terbentuk.

Jurnal:

Mahesa Rannie dan Zulhidayat Pola Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945

Penelitian ini mengulas pola pembentukan koalisi di tiga pemerintahan. Adanya koalisi gemuk dikarenakan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia demi menjaga stabilitas pemerintahan dan demi terwujudnya efektifitas serta efisiensi didalam tubuh pemerintahan.

Penelitian ini mengkomparatifkan pola pembentukan koalisi yang terjadi di tiga pemerintahan pasca amandemen UUD 1945. Pola koalisi dimulai pra , saat, dan pasca pemilihan presiden/wakil presiden dan dilanjutkan dengan membentuk kabinet untuk memilih menteri.

Penelitian ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai teori yang dijadikan sebagai pedoman untuk membongkar pola koalisi yang terbentuk.

Jurnal:

Moch. Nurhasim Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018

Penelitian ini menjelaskan mengenai peta koalisi yang terjadi pada pilkada serentak 2018 di Indonesia. Penelitian ini menemukan pola atau pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan *cartel-seeking*.

Kelebihan pada penelitian ini terletak pada cakupan penelitian yang mencoba menghubungkan model koalisi yang terbentuk pada pilkada 2018 mulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota yang ternyata tidak linear atau “nano-nano”.

Penelitian ini tidak jelaskan lokasi penelitian dimana. Peneliti menyimpulkan model koalisi “nano-nano” yang terbentuk terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang melakukan Pilukada.

Jurnal: Luthfi Makhasin Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015

Adanya tawaran baru dalam menangkap fenomena yang terjadi pada Pilkada Serentak di 21 daerah di Jawa Tengah. Adapun tawaran barun tersebut adalah empat tipologi Koalisi yang terbentuk antar lintas partai dan bagaimana pola umum pembentukan koalisi yang terjadi.

Penelitian ini mampu menawarkan empat tipologi pembentukan koalisi dari fenomena Pilkada serentak di Jawa Tengah. Adapun empat tipologi pembentukan koalisi adalah Koalisi Kecil Ideologis (KKI), Koalisi Besar Ideologis (KBI), Koalisi Kecil Pragmatis (KKP), dan Koalisi Besar Pragmatis (KBP).

Penelitian ini belum mencakup pembahasan detail bagaimana dinamika pembentukan koalisi di setiap daerah itu terbentuk karena fokusnya pada usaha menjelaskan pola umum pembentukan koalisi yang terjadi di 21 daerah yang melaksanakan Pilkada di Jawa Tengah.

Jurnal: Esty Ekawati Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pembentukan koalisi pada pemilu 2014 memiliki perbedaan yang signifikan dimana pada pemilu 1999 pembentukan koalisi didorong oleh semangat kesamaan Ideologi dan tujuan antar partai dengan kesamaan ideologi tersebut. Sistem pemilihan yang digunakan menjadi alasan utama mengapa pada pemilu 2014 koalisi

Pada penelitian ini sistem pemilihan presiden menjadi temuan penting dalam membongkar fenomena pembentukan koalisi dimana pada tahun 2014 dengan sistem pemilihan langsung berefek kepada tidak adanya partai yang memperoleh suara mayoritas di parlemen. Sedangkan pada tahun 1999 pemilihan presiden tahun 1999 dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR yang melibatkan sekitar 695 anggota, sehingga dinamika politik yang terjadi hanya berkisar di

Penelitian ini tidak menjelaskan secara periodisasi pemilihan. Tidak ditemukannya alasan mengapa peneliti tidak menjelaskannya secara periodisasi pemilihan. Penelitian yang dilakukan dengan mengkomparatifkan pemilihan pada tahun 2014 dengan pemilihan tahun 1999 untuk mengungkapkan bagaimana koalisi yang terbentuk tidak berdasarkan ideologi partai. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2009 juga terdapat peta koalisi yang berbeda pada tahun 1999 dimana

yang terbentuk tidak serupa dengan pemilu 1999 dimana pembentukan koalisi tidak dapat melupakan ideologi yang dianut oleh partai.

kalangan elit partai.

menggunakan sistem pemilihan presiden yang sama dengan periode 2014 yakni dipilih secara langsung oleh rakyat.



Sumber: Diolah oleh Peneliti tahun 2019

Penelitian ini merupakan proposal skripsi Jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Penelitian ini berfokus kepada orientasi partai

GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Berangkat dari penjelasan mengenai orientasi partai politik yang diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yaitu, partai pencari kekuasaan (*office seeking*), partai pemburu suara (*vote seeker*), dan partai berorientasi pejuang kebijakan (*policy seeking*), peneliti nantinya akan mengurai karakteristik model koalisi yang akan terbentuk yang dilihat dari orientasi partai politik karena orientasi partai politik menjadi tolak ukur dalam pembentukan koalisi.

Seperti contoh jika partai GERINDRA dalam membentuk koalisi tidak menjadikan kesamaan ideologi dan platform partai sebagai landasan utama dalam menentukan rekan koalisi maka Partai Gerindra berorientasi sebagai pencari suara. Partai GERINDRA cenderung akan mengajak sebanyak mungkin partai politik lainnya untuk dijadikan sebagai rekanan koalisi agar bisa mencapai suara mayoritas mutlak. Jika koalisi ini terbentuk maka koalisi ini bersifat koalisi *Minimum Size Coalition* yang dijelaskan oleh Arend Lijphart.

Begitu juga dengan PKS, partai yang dikategorikan sebagai partai kader yang sangat berpegang teguh terhadap ideologi kepartainnya dalam melahirkan sikap politik, PKS akan cenderung memiliki orientasi *Policy Seeking* atau pencari kebijakan. Dapat dihubungkan bahwa PKS dalam membentuk koalisi akan cenderung kepada koalisi yang dinamakan *Minimal Connected Winning* yakni PKS membentuk suatu koalisi dengan dua atau lebih partai yang memiliki kedekatan hubungan kebijakan atau suatu isu tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan studi perbandingan. Studi perbandingan disini adalah membandingkan dua partai yang berbeda secara ideologi dan platform partai. Peneliti berpandangan bahwa jika penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua partai yang berbeda ideologi tersebut peneliti akan menemukan bagaimana perbedaan dan persamaan antara kedua partai terhadap kecenderungan dalam membentuk koalisi. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meneliti tentang orientasi partai politik yang difokuskan kepada ideologi partai tertentu terhadap pembentukan koalisi pada Pilkada

Kota Bukittinggi Tahun 2020. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mengedepankan judul “*Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pembentukan Koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020*”.

2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian yang membahas mengenai orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020, maka peneliti akan menguraikan teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai pisau analisis untuk mengupas dan menganalisis penelitian ini.

2.2.1 Konsep Partai Politik

a. Pengertian Partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya bahkan partai politik menjadikan kekuasaan sebagai orientasinya.¹⁵ Partai politik menurut Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2002 Pasal 1 adalah “organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum”.¹⁶

Pengertian tersebut menunjukkan pentingnya ideologi bagi partai politik. Ideologi dijadikan sebagai orientasi atau rujukan untuk membuat keputusan-keputusan politik, menjadi karakter bagi anggota-anggota partai, sebagai acuan didalam membuat program kerja dan menentukan tujuan dari sebuah partai politik.¹⁷ Selain itu ideologi juga digunakan

¹⁵ Miriam Budiardjo., loc.cit.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2002 pasal 1 tentang Partai Politik.

¹⁷ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 115

sebagai pembeda antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain (*positioning*). Dengan pentingnya ideologi bagi partai politik, semestinya setiap partai politik konsisten menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam aktivitasnya.

b. Orientasi Partai Politik

Orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Orientasi juga merupakan sebuah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi lebih kepada penamaan terhadap sikap dasar, pertimbangan-pertimbangan, pemikiran seseorang atau kelompok untuk melahirkan tindakan atau keputusan. Tetapi, pengertian orientasi akan berbeda maknanya tergantung konteksnya. Seperti contoh jika konteksnya adalah kesehatan terdapat orientasi seksual atau kecenderungan seksual yang merupakan pola ketertarikan seksual kepada orang-orang lawan jenis atau gender yang nantinya bermuara kepada pengkategorian identitas seksual dan terminologi.

Sedangkan jika konteksnya politik maka orientasi politik memiliki makna yang sangat luas meliputi, melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap penilaian, pengetahuan, dan keyakinan. Orientasi politik adalah suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat. Orientasi politik dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat dan di luar masyarakat kemudian membentuk sikap dan menjadi pola masyarakat memandang objek politik. Orientasi politik merupakan perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya adalah berupa kegiatan, hal ini perlu ditegaskan karena orientasi individu tidak selalu *termanifestasikan* dalam perilakunya, orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik.¹⁸

¹⁸ Ibid., hlm. 171.

Orientasi politik tidak saja menjelaskan perilaku dalam individu atau masyarakat dalam memandang objek politik. Orientasi politik juga dapat ditemui pada suatu kelompok politik yaitu partai politik. Menurut Cornelis Lay yang memodifikasi pandangan dari Steven B Wolinetz terdapat tiga orientasi partai politik, yaitu:

1. *The vote seeking party*, partai yang berorientasi pada kemenangan pemilu, sehingga hal-hal lain termasuk kebijakan dan jabatan publik yang dikejar disesuaikan dengan tujuan tersebut. Partai politik sebagai mesin politik pengumpul suara (*electoral machine*), dimana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (*vote seeking*).
2. *The Office Seeking Party*, partai yang berorientasi menduduki jabatan publik baik menggunakan kekuatan sendiri maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain. Partai yang juga berorientasi hanya sebagai kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik.
3. *The policy seeking party* adalah partai yang berorientasi pada isu dan memprioritaskan orientasi kebijakannya dibandingkan merebut suara pemilih atau menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian partai politik sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologis yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan Negara.

Dari ketiga orientasi kepartaian diatas, partai politik di Indonesia saat umumnya tidak berorientasi sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologi. Namun lebih pada sarana untuk pengumpul suara (*electoral machine*), dan sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*office seeking*). Kecenderungan itu terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini: (a) partai-partai politik cenderung bekerja secara pragmatis; (b) menguatnya oligarki partai politik; (c) partai politik berorientasi pada kekuasaan, bukan dibangun dari kedekatan ideologi.

2.2.2 Teori Koalisi

Koalisi adalah upaya penggabungan kelompok atau individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi serta memerlukan aksi bersama para anggota.¹⁹ Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan, dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai.

Secara teoritis, banyak para ahli yang mengemukakan pandangannya tentang koalisi partai politik, Pertimbangan untuk membentuk koalisi adalah dengan menggunakan formula *Minimal Winning Coalition (MWC)* yang dipopulerkan oleh William Riker. MWC didasarkan atas kecenderungan ideologi kiri hingga ideologi kanan. Koalisi tersebut, dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan spektrum ideologi. Formula MWC ini memiliki varian turunannya yang bermacam-macam seperti *Minimum Size Coalition (MSC)*, *Minimum Range Coalition (MRC)*, *Bargaining Proposition (BP)*, *Minimal Connected Wininng Coalitions (MCW)* dan sebagainya.²⁰

Sedangkan teori koalisi menurut Arend Lijphart adalah :

1. *Minimal winning coalitions* yang menganut prinsip besaran (*zise principle*), koalisi ini terdiri atas dua atau lebih partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen, tetapi kemenangan ini bersifat minimal, artinya tidak ada penambahan partai lain ke dalam koalisi kalau hal tersebut tidak diperlukan, hanya ingin menjadi suara mayoritas mutlak.
2. *Minimum size coalitions* yaitu koalisi yang didasarkan pada asumsi yang sama tentang maksimalisasi kekuatan, koalisi ini lebih rasional dan logis dalam

¹⁹ Arend Lijphart., loc.cit. hlm 221.

²⁰ Bambang Cipto, Partai, Kekuasaan dan Militerisme, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2000, hlm 23-27.

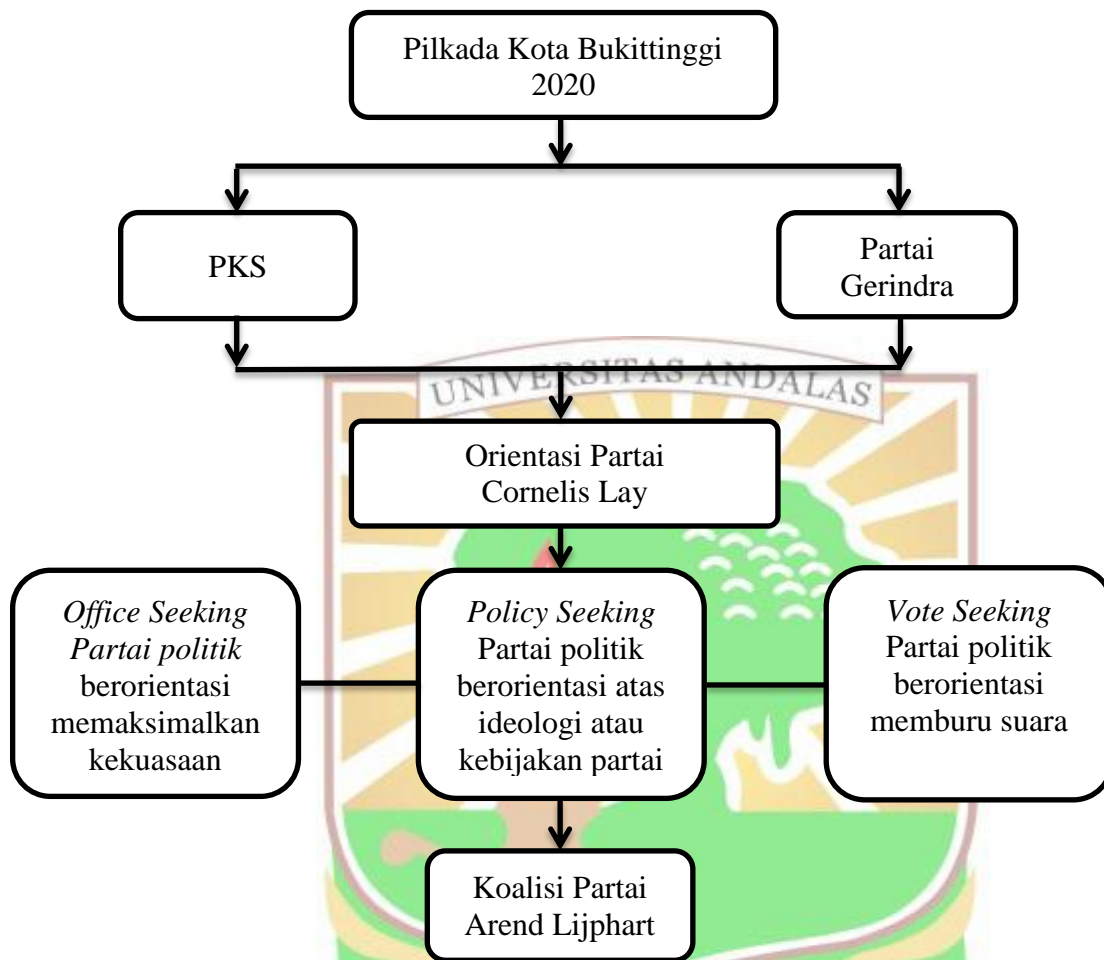
memperhitungkan kekuatan dari pada yang pertama karena koalisi yang dibentuk berdasarkan kekuatan strategis masing-masing partai di parlemen.

3. *Coalitions with smallest number of parties* yakni koalisi yang dibentuk antara partai besar dan partai kecil dengan alasan bahwa berkoalisi dengan partai kecil mempermudah di dalam bernegosiasi dan tawar menawar.
4. *Minimal range coalitions* yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kesamaan pandangan dan preferensi didalam kebijakan.
5. *minimal connected winning coalitions*, yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kedekatan hubungan kebijakan atau suatu isu tertentu

Perilaku partai politik yang menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di parlemen (*minimal winning coalition*) memiliki orientasi partai yang memaksimalkan kekuasaan "*office seeking*". Sedangkan partai yang menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan atau ideologi dan meniadakan rekan yang tidak penting (*minimal conected coalition*) memiliki orientasi koalisi partai yang bertujuan "*policy seeking*", yaitu mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai. Bila koalisi seperti ini terbentuk, maka loyalitas peserta koalisi partai akan terbentuk, karena diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan.

Pada penelitian ini, teori yang digunakan peneliti adalah teori koalisi oleh Arend Lijphart yang mengemukakan bentuk koalisi ditinjau dari perilaku partai politik dalam pembentukannya. Terdapat lima bentuk format koalisi yang di kategorikan kedalam dua bentuk karakteristik atau orientasi partai politik dalam pembentukan koalisi. Pandangan dari Arend Lijphart sangat relevan dalam penelitian ini dimana peneliti akan mengidentifikasi karakteristik model koalisi yang akan terbentuk dilihat dari orientasi yang terdapat dalam partai politik.

2.3 Skema Pemikiran



Bagan skema pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dalam masa Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi. Untuk menemukan orientasi kedua partai tersebut peneliti menggunakan konsep orientasi partai politik oleh Cornelis Lay. Selanjutnya peneliti akan membandingkan orientasi partai GERINDRA dan PKS terhadap pembentukan koalisi yang ditinjau dari perspektif teori koalisi oleh Arend Lijphart. Sehingga melalui orientasi kedua partai tersebut penelitian ini nantinya mampu mendeskripsikan kecenderungan karakteristik model koalisi yang akan terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan partai tentang orientasi dalam pembentukan koalisi. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.²¹ Penelitian deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya kemudian dibandingkan tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif secara komparatif dalam melakukan analisis orientasi partai yang terdapat pada partai politik GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi pada pemilihan kepada daerah Kota Bukittinggi tahun 2020. Penelitian yang mengarah kepada

²¹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 131.

membandingkan kedua partai tersebut bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dari kedua partai terkait orientasi partai dalam pembentukan koalisi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPC partai GERINDRA dan DPD PKS Kota Bukittinggi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena yang menjadi objek penelitian adalah kedua partai tersebut. Peneliti ingin melihat orientasi kedua partai tersebut dalam pembentukan koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Pada dasarnya kedua partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Serta kedua partai tersebut merupakan partai yang memperoleh kekuatan parlemen yang sama di Kota Bukittinggi pada hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019.

3.3 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen, atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.²²

Pada penelitian ini peneliti melakukan serangkaian tindakan terkait dengan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan obyek yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif ini, peranan peneliti dalam penelitian ini sangat penting dan menentukan, karena ciri-ciri penelitian kualitatif menempatkan peneliti baik secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data yang utama atau sebagai instrumen penelitian itu sendiri.²³

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung 2005, hlm. 61

²³Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 168

Sedangkan alat-alat yang lain seperti panduan wawancara, alat rekaman dan lainnya hanyalah sebagai alat bantu pengganti peneliti itu sendiri sebagai pengkonstruksi realitas atas dasar pengalaman di media peneliti.

Penelitian ini diawali pada tanggal 18 februari 2020 pukul 15.00 WIB dengan meminta surat izin penelitan ke dekanat, lalu tanggal 28 oktober 2019 pukul 16.00 WIB peneliti Peneliti meminta izin kepada pembimbing untuk penelitian ke lokasi penelitian. Pada tanggal 01 Maret 2020 peneliti memasukkan surat izin penelitian ke kantor DPD PKS dan DPC partai GERINDRA Kota Bukittinggi. Tanggal 03 Maret 2020 peneliti kembali ke kantor DPD PKS bertemu dengan Bapak M. Syafaat selaku sekretaris DPD PKS Kota Bukittinggi dan melakukan wawancara dimulai pukul 15.05 WIB tentang karakteristik PKS dan visi-misi DPD PKS Kota Bukittinggi , wawancara tersebut berlangsung sekitar 45 menit. Di hari yang sama peneliti juga bertemu dengan kepala administrasi DPC GERINDRA Kota Bukittinggi Kakak Ica pada pukul 16.49 WIB. Peneliti diberikan agenda untuk mengadakan wawancara dengan informan yang dibutuhkan dari DPC GERINDRA Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 09.25 WIB peneliti pergi ke kantor DPRD Kota Bukittinggi untuk meninjau keberadaan anggota Fraksi PKS dan Partai GERINDRA. Dihari yang sama pada pukul 13.30 WIB peneliti kembali ke kantor DPD PKS untuk meminta data struktur kepengurusan. Hari kamis pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 09.25 WIB peneliti memasukkan surat izin penelitian ke kantor DPRD Kota Bukittinggi yang tujuan kepada anggota Fraksi PKS dan anggota Fraksi partai GERINDRA. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 peneliti bertemu dengan ketua DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi yaitu Bapak Ismunandi Sofyan bertempat di Balai Sidang Bung Hatta Kota Bukittinggi pada pukul 15.10. Pada kesempatan ini peneliti berdiskusi mengenai mekanisme internal partai GERINDRA dalam mengusung bakal calon kepala daerah Kota Bukittinggi. Peneliti juga menanyakan persoalan hubungan partai GERINDRA dengan partai lainnya di

Kota Bukittinggi serta peneliti menanyakan persoalan arah partai GERINDRA dalam menghadapi Pilkada Kota Bukittinggi 2020. Proses wawancara bersama Bapak Ismunandi Sofyan berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 peneliti berkunjung kerumah bapak Syaiful Efendi yang merupakan kepala bidang kaderisasi DPD PKS Kota Bukittinggi. Beliau juga merupakan anggota DPRD Kota Bukittinggi Fraksi-PKS periode 2019-2024. Pada kesempatan ini peneliti menanyakan terkait proses kaderisasi yang berjalan di DPD PKS Kota Bukittinggi. Peneliti juga menyematkan pertanyaan terkait dinamika perpolitikan di Kota Bukittinggi yang tengah berkembang saat ini. Beliau menjabarkan dengan jelas terkait dilema yang dihadapi oleh kader-kader partai politik pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020. Terakhir peneliti menanyakan perihal koalisi yang akan terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi 2020 nantinya. Bagaimana sikap yang akan dilahirkan oleh PKS. Proses wawancara tersebut berlangsung selama kurang lebih 54 menit.

Pada hari selanjutnya tanggal 09 Maret 2020 peneliti berkunjung ke kantor DPRD Kota Bukittinggi. Pada pukul 11.07 peneliti melaksanakan proses wawancara bersama Anggota DPRD Kota Bukittinggi F-GERINDRA yaitu Bapak Shabirin Rachmat. Seorang yang akrab dipanggil "*inyiak shabirin*" ini menjabat sebagai ketua Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. Pada kesempatan ini peneliti menanyakan terkait dinamika kepartaian yang berkembang di DPRD Kota Bukittinggi. Sebagai kader partai pemenang beliau mencoba menjelaskan secara rinci dinamika yang terjadi di parlemen Kota Bukittinggi. Beliau menjelaskan bahwa potensial untuk terjadinya konflik antar partai sejauh ini relatif kecil. Karena faktor waktu yang masih beradaptasi untuk keseluruhan anggota legislatif. Kemudian peneliti menanyakan terkait kecenderungan partai GERINDRA dalam menentukan sikap koalisi nantinya dalam menghadapi Pilkada Kota Bukittinggi. Pada kesempatan ini beliau

juga menjelaskan bagaimana proses perjalanan pilkada Kota Bukittinggi pada tahun 2015 sampai sekarang.

Pada hari yang sama, peneliti berkesempatan bertemu dengan dewan penasehat DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi yaitu Bapak Asri Bakar. Beliau juga merupakan Anggota DPRD F-GERINDRA Kota Bukittinggi periode 2019-2024. Pada kesempatan ini peneliti menanyakan terkait karakteristik partai GERINDRA. Peneliti juga menanyakan pandangan beliau terkait sikap partai GERINDRA sejauh ini. dan terakhir peneliti menanyakan tentang arahan dari Dewan Penasehat kepada pengurus DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi dalam membangun koalisi dengan partai lainnya dalam menghadapi Pilkada Kota Bukittinggi 2020. Proses wawancara dimulai pada pukul 12.45 sampai pukul 13.28.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Anggota DPRD Kota Bukittinggi F-PKS periode 2019-2024 pada tempat yang sama. Pada pukul 14.05 peneliti bertemu dengan Bapak Ibnu Asis di ruangan Komisi II DPRD Kota Bukittinggi. Peneliti menanyakan terkait dinamika perpolitikan yang tengah berkembang menjelang Pilkada Kota Bukittinggi 2020. Peneliti juga menanyakan pandangan beliau terkait kekuatan partai politik PKS dan partai lainnya dalam menghadapi Pilkada Kota Bukittinggi 2020. Peneliti juga menanyakan kepada beliau terkait bentuk koalisi yang terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015. Kemudian diskusi berakhir setelah beliau menjelaskan terkait kecenderungan PKS dalam membentuk koalisi pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

Setelah peneliti mendapatkan data melalui proses wawancara bersama informan inti yang telah peneliti temui secara keseluruhan. Pada tanggal 11 Maret 2020 peneliti melakukan wawancara bersama Informan triangulasi data yaitu Bapak Syarifuddin Djas. Beliau merupakan pemerhati politik untuk Kota Bukittinggi. Beliau aktif melakukan kritik dan masukan terhadap pemerintah melalui tulisan-tulisan beliau di media cetak. Beliau juga pernah menjadi anggota legislatif periode 2009-2014. Beliau juga merupakan mantan politisi

partai Demokrat. Beliau juga aktif sebagai pembicara di parlemen ketika dimintai pendapat. Pada kesempatan ini pada pukul 16.10 peneliti berkunjung ke rumah beliau. Peneliti menanyakan pandangan beliau terhadap PKS dan partai GERINDRA dalam berperan aktif di ranah perpolitikan Kota Bukittinggi. Berangkat dari pembahsan Ideologi partai, kebijakan-kebijakan, serta sikap partai yang dilahirkan. Beliau juga memaparkan dinamika politik menjelang pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Peneliti menanyakan pandangan beliau terkait kecenderungan koalisi yang akan terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Beliau sedikit mengulas bagaimana proses terbentuknya koalisi partai pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 lalu. Dan wawancara ini ditutup dengan penjelasan beliau terkait pandangan beliau terhadap PKS dan GERINDRA dalam membentuk Koalisi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

Informan Triangulasi data selanjutnya adalah Bapak M. Nur Idris, SH. Beliau merupakan pemerhati politik kota bukittinggi. Beliau juga menjadi dosen LB di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 10.50 peneliti bertemu dengan beliau di Kantor LBH Andalas Kota Bukittinggi. Pada kesempatan ini peneliti menanyakan terkait pandangan beliau terhadap dinamika politik yang berkembang menjelang Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020. Peneliti juga menanyakan pandangan beliau terhadap koalisi yang terbentuk pada pilkada kota bukittinggi tahun 2015. Sehingga pertemuan ini diakhiri ketika peneliti telah mendapat penjelasan terkait pertanyaan peneliti tentang bagaiman kecenderungan PKS dan partai GERINDRA dalam membentuk koalisi partai pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan salah satu tahap pemilihan informan menurut Burhan Bungin,²⁴ yaitu tahap pemilihan informan awal, yang ditentukan melalui

²⁴Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 53-54.

metode *purposive sampling*. Pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pengumpulan data, berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang diambil tidak dipertimbangkan, apabila dirasa sudah cukup pengambilan sampel dihentikan.²⁵ *Purposive sampling* artinya sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Kriteria yang ditetapkan bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk kelancaran penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti membuat kriteria khusus dalam penentuan informan yang nantinya akan diminta keterangan ataupun data. Berikut adalah kriteria yang peneliti tetapkan:

Tabel 3.1: Kriteria Informan Penelitian

No.	Kriteria Informan	Alasan
1.	Informan merupakan pengurus partai politik tingkat Kota	Pengurus partai politik tingkat Kota merupakan kelompok yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan sikap partai.
2.	Informan merupakan pengurus partai politik tingkat Kota yang membidangi kaderisasi partai	Pengurus partai politik tingkat Kota yang membidangi kaderisasi partai merupakan kelompok yang merumuskan dan menjalankan program-program berdasarkan ideologi yang dimiliki oleh partai tersebut
3.	Informan merupakan kader partai GERINDRA dan PKS yang menjadi anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019/2024	Kader partai yang menjadi anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019/2024 adalah kelompok yang memiliki kapasitas untuk diminta keterangan mengenai perkembangan dinamika kepartaian di Kota Bukittinggi.

Dari tabel diatas, maka peneliti menetapkan beberapa informan yang akan diminta keterangan melalui kriteria yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, adapun informan yang dirasa peneliti relevan dengan penelitian ini adalah:

²⁵Sukandarrumidi, Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, Gadjah Mada University Press, 2014, Hlm. 30

Tabel 3.2: Informan Inti

No	Nama	Keterangan
1.	Ismunandi Sofyan	Ketua DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi
2.	Nur Asra	Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi
3.	Andri Fidal	Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi
4.	M. Syafaat	Sekretaris DPD PKS Kota Bukittinggi
5.	Shabirin Rachmat	Anggota DPRD Kota Bukittinggi F-GERINDRA Periode 2019-2024
6.	Ibnu Asis	Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan dan Pilkada DPD PKS Kota Bukittinggi
7.	Asri Bakar	Dewan Penasehat DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi
8.	Syaiful Efendi	Kepala Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Bukittinggi

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Dalam penelitian ini, yang disebutkan diatas dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Selanjutnya, informan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian serta informan-informan selanjutnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian akan berhenti apa bila dari sejumlah informan yang diwawancarai telah dapat memberikan informasi yang cukup untuk penelitian ini.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian.²⁶ Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Analisis data tersebut harus sesuai pengujian ataupun pengkategorian awal dengan hasil temuan lapangan. Seluruh data yang didapat akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Unit analisis dalam suatu penelitian sangatlah berguna untuk memfokuskan kajian yang akan diteliti, atau dengan kriteria-kriteria tertentu agar dapat menjawab masalah penelitian diakhir proses penelitian yang akan dilakukan nantinya.

²⁶Burhan Bungin., op.cit. hlm 52

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, maka informan penelitian yang diwawancarai adalah orang-orang yang mempunyai peran yang sangat penting atau orang-orang yang sangat berpengaruh yang tergabung dalam kelompok tersebut. Pada penelitian ini informan yang dipilih berdasarkan informasi baik melalui media maupun fakta-fakta yang menunjukkan bahwa informan memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan peneliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen²⁷. Data primer diperoleh dengan wawancara, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan. Berikut dijelaskan secara rinci:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi fenomena yang terjadi.²⁸

Dengan kata lain, peneliti mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah dipersiapkan tanpa melupakan esensi pertanyaan terkait dengan data yang ingin didapatkan. Dalam hal ini, untuk memudahkan peneliti dalam rangka

²⁷ Sugiyono., op.cit. hlm. 62

²⁸ Ibid., hlm. 232

mendapatkan informasi, peneliti memanfaatkan pedoman wawancara agar penelitian tidak keluar dari permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dari salah satu pertanyaan peneliti dirasa belum terjawab oleh narasumber, maka peneliti berhak memberikan pertanyaan tambahan terhadap topik tersebut sehingga pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terjawab dengan sempurna oleh narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi aspek penting karena penggalian data dari aspek historis tidak mungkin dilakukan tanpa menyelidiki data-data autentik. Untuk lebih menguatkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam, juga diperlukan data-data sekunder dimana data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang penting dan relevan dengan penelitian ini.

3.7 Uji Pembuktian (Triangulasi Data)

Dalam penelitian ini *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi* sumber data, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang beradab, orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Alasan peneliti menggunakan teknik *triangulasi* ini karena memungkinkan terlihat jelas perbedaan atau persamaan pandangan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan apabila terdapat perbedaan peneliti bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan

tersebut. Acuan dalam keperluan triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah bagaimana kita membuktikan keabsahan informasi yang diberikan informan, dan juga melakukan perbandingan diantara informan peneliti. Peneliti juga menggunakan triangulasi dari para tokoh ataupun akademisi untuk mengetahui apakah informasi yang didapat oleh peneliti benar adanya.

Dalam menentukan informan triangulasi maka peneliti juga secara *purposive* memilih orang-orang yang akan peneliti mintai informasi. Berdasarkan uraian di atas, kriteria yang peneliti buat untuk menjadi informan triangulasi data yaitu:

1. Informan merupakan seorang akademisi yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, yang memandang suatu kejadian dari sudut kajian ilmu yang dimilikinya. Dalam hal ini peneliti memilih informan dari sudut pandang keilmuan politik.
2. Informan selanjutnya yaitu dari salah satu pemerhati politik yang dapat membantu peneliti untuk melihat fenomena secara menyeluruh dari berbagai sumber maupun dari beberapa pandangan yang telah dituangkan kedalam tulisan di media cetak.

Tabel 3.3: Informan Triangulasi Data

No	Nama	Keterangan
1.	M. Nur Idris, S.H	Pemerhati Politik Kota Bukittinggi / Mantan Politisi Partai PAN
2.	Syarifuddin Djas, S.H	Pemerhati Politik Kota Bukittinggi / Mantan Politisi Partai Demokrat

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2019

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, dokumentasi dan bahan lainnya dalam meningkatkan pemahaman atau menjelaskan sesuatu sehingga mudah untuk dipahami. Setelah terkumpul, data selanjutnya disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁹

²⁹Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif., op.cit. hlm. 70.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik merupakan pandangan dari peneliti sendiri, dan data emik merupakan pandangan informan. Kedua informasi ini dianalisis oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat ilmiah, yang menunjang apa yang disampaikan oleh para informan, disertai dengan literatur yang ada. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif kualitatif tanpa mengabaikan data yang bersifat kuantitatif.

3.9 Rancangan Struktur Penelitian

Agar penulisan laporan hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti, maka penulisan laporan akan disusun secara sistematis, berikut uraian rancangan struktur penulisan:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan latar belakang bagaimana posisi partai pada pilkada yang memainkan peran sentral beserta mekanisme pembentukan koalisi oleh partai politik. Dimana rumusan masalah pada bab ini adalah bagaimana orientasi yang dimiliki oleh partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan koalisi dalam pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kedua partai tersebut terhadap kecenderungan dalam menentukan rekan koalisi menuju pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada sub bab pertama memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan guna melihat perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Pada sub bab kedua terdapat kerangka teori dalam penulisan penelitian ini. Dimana teori yang digunakan adalah teori orientasi partai politik dan teori koalisi partai politik. Pada sub bab ketiga terdapat bagan skema pemikiran dalam menjelaskan alur penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian, dengan menggunakan metode ini agar peneliti mendapat gambaran untuk mempermudah keberlanjutan penelitian saat turun lapangan. Selain itu juga membahas mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian yang akan di wawancarai, teknik pengumpulan data, unit analisis, triangulasi data, analisis data dan struktur penulisan. Metode penelitian yang dimaksud ialah metode kualitatif dengan tehnik pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap narasumber. Para narasumber atau informan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data seperti ketua kelompok yang diteliti. Dan triangulasi data akan melibatkan akademisi ilmu politik dan/atau pemerhati politik, sehingga data yang telah dikumpulkan melalui wawancara tersebut dapat diratifikasi menjadi data yang valid dan faktual.

d. BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisikan gambaran mengenai latar belakang dan profil di Partai GERINDRA dan PKS secara umum dan secara khusus. Sekaligus menjelaskan bagaimana dinamika perpolitikan yang tengah berkembang di Kota Bukittinggi. Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan secara detail tentang Kota Bukittinggi sebagai daerah yang ikut serta pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

e. BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menggambarkan dan menjelaskan data dan fakta lapangan yang didapat melalui teknik wawancara terhdap informan penelitian. Dalam bab ini peneliti juga menjelaskan tentang orientasi yang diadopsi oleh partai GERINDRA dan PKS dalam membentuk koalisi. Serta memaparkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh kedua partai tersebut dalam hal pembentukan koalisi. Penulis juga akan memberikan analisa actual berdasarkan teori yang ada dalam menjelaskan kecenderungan koalisi yang akan terbentuk pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

f. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil pembahasan, analisa keseluruhan, dan jawaban dari tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh peneliti yang berhubungan dengan hasil temuan di lapangan terkait dengan orientasi yang diadopsi partai terhadap pembentukan koalisi pada fenomena Pemilihan kepala daerah di Kota Bukittinggi tahun 2020. Dalam kesimpulan dan saran, penulis akan menegaskan temuan penelitian terkait orientasi partai GERINDRA dan PKS dalam pembentukan Koalisi pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.



